



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

# ***Rencana kerja Perubahan Tahun 2024***



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jalan K.H. Abdul Halim No. 522 Majalengka

email : [Badankesbangpolmjl@gmail.com](mailto:Badankesbangpolmjl@gmail.com) Website : [Bakesbangpol.majalengkakab.go.id](http://Bakesbangpol.majalengkakab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas petunjuk dan karunia-NYA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RPJMD dan di tuangkan dalam RKPD Tahunan yang berisi Rencana Target Kinerja maupun Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tahun 2024.

Kami sadar karena keterbatasan kemampuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 banyak kekurangannya, maka kami mohon saran perbaikan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Majalengka, 18 Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Majalengka



**Dr. H. RI RAHYUBI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 003

## DAFTAR ISI

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                      | <b>ii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                                   |           |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                    | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                    | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                 | 5         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                             | 5         |
| <b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023</b>                        |           |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra .....   | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol Tahun 2022 .....           | 12        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... | 12        |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                               | 15        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                 | 16        |
| <b>BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN</b>                                |           |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                              | 17        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                         | 20        |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....                                               | 19        |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b>                                                      | <b>22</b> |
| <b>Lampiran .....</b>                                                        | <b>23</b> |

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Berdasarkan amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra Tahun 2024 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dimana Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Majalengka baru di bentuk pada Tahun 2020 sehingga perlu di lakukan perubahan RENSTRA dan indikator kinerja dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Majalengka. Hal ini selaras dengan sasaran Pembangunan Daerah :

1. Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri
2. Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3. Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan
4. Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - t. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
  - u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  - w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dibuat adalah :

1. Bahan Evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, tahun 2023 yang sedang berjalan dan penganggaran Tahun 2024.
2. Menyelaraskan visi Badan dengan Renstra Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RPJMD maupun dalam RKPD tahun berjalan.

3. Bahan Penyusunan Kebijakan Pembangunan dan Penganggaran baik dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada indikator sasaran strategis yang menunjang perencanaan yang matang dan menunjang Sistem Akuntabilitas yang selaras dan dapat di pertanggungjawabkan.

Sedangkan Tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjamin akuntabilitas perumusan rencana strategis sesuai dengan kebutuhan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Majalengka
- 2) Tersedia nya dokumen sebagai arahan dan acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi guna tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian**

##### **Renstra**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun berdasarkan kaidah yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sedangkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 berpedoman pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana, sehingga dapat melihat kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan sehingga menjadi dasar dalam perencanaan tahun berikutnya yang lebih baik, maka perlu diukur sejauhmana capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan.

Hasil Evaluasi terhadap Program dan kegiatan Tahun 2022 berkaitan dengan terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disajikan dalam tabel ini :

**Tabel 2.1**

**Pencapaian Kinerja dan Rencana Kerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka  
Tahun 2022**

| <b>No</b> | <b>Program<br/>Pembangunan</b>                                                                                                         | <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Target</b> | <b>Realisasi<br/>Target</b> | <b>% Capaian<br/>Kegiatan</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.        | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan                                                                           | Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.                                                                                  | 100 %         | 100 %                       | 100 %                         |
| 2.        | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parai politik, pemilihan umum, Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah | 100 %         | 100 %                       | 100 %                         |
| 3.        | Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                          | Fasilitasi pendaftaran Organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan omas asing di daerah.                                                                                       | 100 %         | 100 %                       | 100 %                         |
|           |                                                                                                                                        | Monitoing dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan omas asing di daerah.                                                                        | 100 %         | 100 %                       | 100 %                         |
| 4.        | Program                                                                                                                                | Monitoring dan evaluasi dan                                                                                                                                                                                                                | 100 %         | 100 %                       | 100 %                         |

|                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
|                                                                                 | Pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional ekonomi, sosial dan budaya                        | pelapoan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi FKUB dan liran kepercayaan di daerah                                                                                      |          |          |       |
| 5.                                                                              | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial | Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah. | 100 %    | 100 %    | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Kegiatan fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.                                                                                                                                                       | 100 %    | 100 %    | 100 % |
| <b>Program Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah Kabupaten<br/>/Kota</b> |                                                                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                       | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                            | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                            | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                    | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                        | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                          | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn                                                                                                                                                                                  | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
|                                                                                 |                                                                                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran                                                                                                                                                                                                | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |

Pada Tahun Anggaran Tahun 2022 Secara umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sudah dapat berjalan tertib dan lancar sehingga capaian kinerja dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a. Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Majalengka telah mencapai target sasaran yang telah ditetapkan .
- b. Kinerja Program Prioritas yang dilaksanakan Tahun 2022 campaiannya 100%, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun Realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Realisasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2022**

| Kode                | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anggaran<br>(Rp.)         | Realisasi<br>(Rp.)   | Capaian realisasi<br>anggaran % |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>8.01.02</b>      | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter<br/>Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>122.150.000</b>        | <b>117.195.000</b>   | <b>95.94</b>                    |
| <b>8.01.02.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan<br/>Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                                     | <b>122.150.000</b>        | <b>117.195.000</b>   | <b>95.94</b>                    |
| 8.01.02.2.01.04     | Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.                                                                                                                                              | 122.150.000               | 117.195.000          | 95.94                           |
| <b>8.01.03</b>      | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga<br/>Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan<br/>Etika serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                                  | <b>2.260.163.0<br/>00</b> | <b>2.260.101.260</b> | <b>100.00</b>                   |
| <b>8.01.03.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan<br/>Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan<br/>Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan<br/>dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala<br/>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>2.260.163.0<br/>00</b> | <b>2.260.101.260</b> | <b>100.00</b>                   |
| 8.01.03.2.01.03     | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya                                                                                                                                                                                                                                       | 2.260.163.00<br>0         | 2.260.101.260        | 100.00                          |



|                 |                                                                                                                                                                           |             |             |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|                 | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parai politik, pemilihan umum, Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah |             |             |       |
| 8.01.04         | <b>Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>                                                                                                      | 383.965.000 | 383.733.241 | 99.94 |
| 8.01.04.2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                 | 383.965.000 | 383.733.241 | 99.94 |
| 8.01.04.2.01.03 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                        | 383.965.000 | 383.733.241 | 99.94 |
| 8.01.04.2.01    | <b>Fasilitasi pendaftaran Organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan omas asing di daerah.</b>               |             |             |       |
| 8.01.04.2.01.03 | Monitoing dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan omas asing di daerah.       |             |             |       |
| 8.01.06.2.01    | <b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>                                                                                           |             |             |       |
| 8.01.06.2.01.04 | Monitoring dan evaluasi dan pelapoan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan                                                 |             |             |       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | narkotika, fasilitasi FKUB dan aliran kepercayaan di daerah                                                                                                                                                                                              |                      |                       |              |
| <b>8.01.06</b>         | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                          | <b>166.255.000</b>   | <b>166.026.625</b>    | <b>99.86</b> |
| <b>8.01.06.2.01</b>    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                          | <b>166.255.000</b>   | <b>166.026.625</b>    | <b>99.86</b> |
| 8.01.06.2.01.03        | Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama inteligen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.              | 166.255.000          | 166.026.625           | 99.86        |
| <b>8.01.06.2.01</b>    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                          |                      |                       |              |
| 8.01.06.2.01.04        | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                      |                       |              |
| <b>8.01.01</b>         | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3.909.366.089</b> | <b>33.753.230.881</b> | <b>96.01</b> |
| <b>8.01.01.2.02.01</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3.910.159.089</b> | <b>3.036.580.974</b>  | <b>95.19</b> |
| 8.01.01.2.02.01.       | Gaji Dan Tunjangan                                                                                                                                                                                                                                       | 3.910.159.089        | 3.036.580.974         | 95.19        |
| <b>8.01.01.2.01</b>    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58.250.000</b>    | <b>58.189.551</b>     | <b>99.90</b> |
| 8.01.01.2.01.01        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 11.950.000           | 11.949.898            | 100          |
| 8.01.01.2.01.02        | Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 4.000.000            | 3.970.000             | 100          |
| 8.01.01.2.01.03        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                             | 4.700.000            | 4.699.991             | 99.25        |

|                     |                                                                                              |                    |                    |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 8.01.01.2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                           | 4.000.000          | 3.970.000          | 100          |
| 8.01.01.2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                           | 4.200.000          | 3.970.000          | 99.25        |
| 8.01.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        | 11.400.000         | 11.399.721         | 100          |
| 8.01.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 18.000.000         | 17.999.950         | 100          |
| <b>8.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                             | <b>31.500.000</b>  | <b>31.377.500</b>  | <b>100</b>   |
|                     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                       | 31.500.000         | 31.377.500         | 100          |
| <b>8.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>398.747.000</b> | <b>398.627.938</b> | <b>99.97</b> |
| 8.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 3.950.000          | 3.948.971          | 99.97        |
| 8.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | 77.150.000         | 77.150.000         | 100          |
| 8.01.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | 12.911.500         | 19.911.413         | 99.90        |
| 8.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | 147.142.500        | 147.027.959        | 99.92        |
| 8.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      | 32.843.000         | 32.842.863         | 100          |
| 8.01.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | 14.750.000         | 14.750.000         | 100          |
| 8.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | 110.000.000        | 109.996.732        | 100          |
| <b>8.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>41.710.000</b>  | <b>41.629.916</b>  | <b>99.81</b> |
| 8.01.01.2.09.05     | Pemeliharaan Mebel                                                                           |                    |                    |              |
| 8.01.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn                                   | 26.210.000         | 26.194.850         | 99.94        |
| 8.01.01.2.09.11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.500.000         | 15.435.066         | 9.58         |
| <b>8.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>189.000.000</b> | <b>186.825.002</b> | <b>98.85</b> |
| 8.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | 56.400.000         | 54.225.002         | 96.14        |
| 8.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran                                                 | 132.600.000        | 132.600.000        | 100.00       |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat program Pembangunan sistem Kinerja Pelayanan Publik Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang meliputi :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

## **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai. Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara nasional dan regional yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya peran serta seluruh stakeholder dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif.

Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai. Dalam kerangka pemikiran seperti itu, maka perlu disusun analisis lingkungan Strategis dan perlu adanya deteksi dini terkait munculnya konflik dan sebagainya di masyarakat.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka meliputi peluang dan tantangan.

1. Kekuatan
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka memiliki visi dan misi yang jelas.
  - b. Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka memiliki kewenangan yang lebih luas.
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yang telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
3. Kelemahan
  - a. Kualitas sumber daya manusia belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
  - b. Kedudukan / status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yang baru dibentuk;
  - c. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dapat menunjang semua tugas pokok dan fungsi;
  - d. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.
  - e. Keberadaan ormas belum terdata baik secara faktual maupun secara aktual.
4. Peluang
  - a. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - b. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - c. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan fokus.

- d. Keterlibatan Masyarakat dalam deteksi dini konflik dan permasalahan yang berkembang di tengah tengah masyarakat.

5. Tantangan

- a. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilang kepedulian pada proses demokratisasi.
- b. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air dan bela negara di masyarakat.
- c. Turunnya partisipasi masyarakat terhadap keikutsertaan dalam demokrasi.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

- 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- 2. Program prioritas pembangunan daerah dan
- 3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se-Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Majalengka.

## **2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Perkembangannya sebagaimana perubahan Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di

Kabupaten Majalengka sediki banyak akan sangat mempengaruhi kinerja yang lebih besar cakupan program nya, selain dalam hal pelayanan kepada pimpinan maupun kepada masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus dapat menjaring usulan dan aspirasi dari masyarakat melali program kegiatan nya, akan tetapi pada Tahun 2021 usulan program dan kegiatan masyarakat belum dapat di akomodir.

Untuk tahun yang akan datang keterlibatan masyarakat akan sangat diperlukan dalam proyeksi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal peran masyarakat dalam kewaspadaan dini, keterlibatan dalam organisasi masyarakat yang lebih baik, maupun peran serta masyarakat dalam politik dan Pemilu di masyarakat maupun dari unsur penguatan lagi wawasan kebangsaan, ideology dan sebagainya dalam upaya lebih mempererat persatuan dan terciptanya kondusifitas keamanan di masyarkat dan bangsa pada umumnya.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Jawa Barat juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan agenda strategis antara lain yaitu:

1. Optimalisasi Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pelaksanaan Rencana Aksi.
2. Percepatan pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan dan forum- forum bidang kesatuan bangsa dan politik (FKUB, FKDM, FPK & PPWK).
3. Penguatan dukungan data dan Informasi bidang politik dan Pemerintahan Umum.
4. Pengembangan sistem deteksi dini penanganan konflik sosial (earlywarning sytem).
5. Pelaksanaan Pendidikan Politik khususnya bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marjinal.
6. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan gangguan pekat (narkoba)

Merujuk pada kegiatan- kegiatan yang ada pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka melaksanakan beberapa program Prioritas dan program Reguler (urusan dasar) serta kegiatan antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
  - a. Kegiatan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
  - a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah
3. Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
  - a. Fasilitasi pendaftaran Organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di daerah.
  - b. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan meditasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di daerah.
4. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional ekonomi, sosial dan budaya
  - a. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi FKUB dan liran kepercayaan di daerah
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi konflik sosial
  - a. Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.

- b. Kegiatan fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah.

Selain program prioritas juga terdapat program Reguler (Urusan Dasar) meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD
  - d. Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAP-SKPD
  - f. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum
  - a. Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - h. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026 adalah :

| No. | Tujuan                                   | Sasaran                                         | Indikator Sasaran                         | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- |       |       |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
|     |                                          |                                                 |                                           | 1                                | 2     | 3     |
| (1) | (2)                                      | (3)                                             | (4)                                       | (5)                              | (6)   | (7)   |
| 1.  | Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa | Tingkat Bina Kesatuan Bangsa              | 100%                             | 100 % | 100 % |
| 2   | Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum | Berkurangnya Konflik Sosial                     | Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani | 100%                             | 100 % | 100 % |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, tahun 2024 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran.

Hal – hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka adalah dalam rangka mewujudkan sasaran strategis daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2021-2022,2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024, 2025, 2026

| Kode |    |    |      |    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021          |               |                |                           | 2022          |               |                |                | 2023          |               | 2024           |                | Proyeksi      |               | KET |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD          | APBD          | RKPD Perubahan | APBD Perubahan            | RKPD          | APBD          | RKPD Perubahan | APBD Perubahan | RKPD          | APBD          | APBD           | RKAP           | 2025          | 2026          |     |
| 8    |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                          | 3,888,554,000 | 6,355,222,359 | 5,734,305,143  | 5,641,617,13 <sub>3</sub> | 6,444,838,159 | 6,020,632,300 | 6,491,899,389  | 6,841,899,389  | 6,708,385,727 | 8,325,389,744 | 51,746,138,167 | 41.411.848.400 | 8,117,146,730 | 8,928,861,403 |     |
| 8    | 01 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                         | 3,888,554,000 | 6,355,222,359 | 5,734,305,143  | 5,641,617,13 <sub>3</sub> | 6,444,838,159 | 6,020,632,300 | 6,491,899,389  | 6,841,899,389  | 6,708,385,727 | 8,325,389,744 | 51,746,138,167 | 52.246.138.167 | 8,117,146,730 | 8,928,861,403 | DAU |
| 8    | 01 |    |      |    | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                           | 2,289,378,000 | 3,749,608,859 | 3,545,553,643  | 3,452,865,63 <sub>3</sub> | 3,800,818,159 | 3,438,099,300 | 3,909,366,389  | 3,909,366,389  | 3,532,202,727 | 4,195,331,744 | 3,620.100.167  | 3.620.100.167  | 4,273,965,300 | 4,701,361,830 | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               | 50,000,000    | 65,000,000    | 65,000,000     | 65,000,000                | 65,000,000    | 65,000,000    | 58,250,000     | 58,250,000     | 80,000,000    | 80,000,000    | 80,000,000     | 80,000,000     | 96,800,000    | 106,480,000   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                | -             | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000                | 11,725,000    | 13,950,000    | 11,950,000     | 11,950,000     | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000     | 18,150,000    | 19,965,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                     | -             | -             | -              | -                         | 3,750,000     | 4,000,000     | 4,000,000      | 4,000,000      | 12,000,000    | 12,000,000    | 12,000,000     | 12,000,000     | 14,520,000    | 15,972,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                           | -             | -             | -              | -                         | 4,200,000     | 4,700,000     | 4,700,000      | 4,700,000      | 6,000,000     | 6,000,000     | 6,000,000      | 6,000,000      | 7,260,000     | 7,986,000     | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                             | -             | -             | -              | -                         | 3,750,000     | 4,000,000     | 4,000,000      | 4,000,000      | 6,000,000     | 6,000,000     | 6,000,000      | 6,000,000      | 7,260,000     | 7,986,000     | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                   | -             | -             | -              | -                         | 4,200,000     | 4,200,000     | 4,200,000      | 4,200,000      | 6,000,000     | 6,000,000     | 6,000,000      | 6,000,000      | 7,260,000     | 7,986,000     | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                          | -             | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000                | 9,500,000     | 13,900,000    | 11,400,000     | 11,400,000     | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000     | 20,000,000     | 24,200,000    | 26,620,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000,000    | 35,000,000    | 35,000,000     | 35,000,000                | 27,875,000    | 20,250,000    | 18,000,000     | 18,000,000     | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000     | 22,000,000    | 24,200,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | 1,554,378,000 | 3,006,046,359 | 2,762,653,900  | 2,669,965,89 <sub>0</sub> | 3,078,849,159 | 2,718,892,300 | 3,190,159,389  | 3,190,159,389  | 2,730,405,727 | 3,503,962,577 | 2,923,556,000  | 2,923,556,000  | 3,303,790,930 | 3,634,170,023 | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                              | 1,539,378,000 | 3,006,046,359 | 2,762,653,900  | 2,669,965,89 <sub>0</sub> | 3,078,849,159 | 2,718,892,300 | 3,190,159,389  | 3,190,159,389  | 2,730,405,727 | 3,503,962,577 | 2,923,556,000  | 2,923,556,000  | 3,303,790,930 | 3,634,170,023 | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | -             | 22,500,000    | 28,000,000     | 28,000,000                | 40,000,000    | 31,500,000    | 31,500,000     | 31,500,000     | 35,000,000    | 0             | 29,675,000     | 29,675,000     | 42,350,000    | 46,585,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                         | -             | 22,500,000    | 28,000,000     | 28,000,000                | 40,000,000    | 31,500,000    | 31,500,000     | 31,500,000     | 35,000,000    | -             | 29,675,000     | 29,675,000     | 42,350,000    | 46,585,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | 632,500,000   | 365,476,049   | 411,499,743    | 411,499,743               | 326,379,000   | 362,097,000   | 398,747,000    | 398,747,000    | 362,097,000   | 365,673,500   | 365,673,500    | 365,673,500    | 438,137,370   | 481,951,107   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.03 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                               | 5,000,000     | 5,115,000     | 5,115,000      | 5,115,000                 | 3,950,000     | 3,950,000     | 3,950,000      | 3,950,000      | 3,950,000     | 3,950,000     | 3,950,000      | 3,950,000      | 4,779,500     | 5,257,450     | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                   | 90,000,000    | 140,032,250   | 208,978,120    | 208,978,120               | 138,487,500   | 125,167,500   | 176,117,500    | 147,142,500    | 125,167,500   | 98,744,000    | 98,744,000     | 98,744,000     | 151,452,675   | 166,597,943   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                              | -             | -             | -              | -                         | 5,673,500     | 12,911,500    | 12,911,500     | 12,911,500     | 12,911,500    | 12,911,500    | 12,911,500     | 12,911,500     | 15,622,915    | 17,185,207    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                               | -             | 80,000,000    | 80,000,000     | 80,000,000                | 61,500,000    | 80,150,000    | 77,150,000     | 77,150,000     | 80,150,000    | 80,150,000    | 80,150,000     | 80,150,000     | 96,981,500    | 106,679,650   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                        | 60,000,000    | 60,000,000    | 34,300,000     | 28,616,000                | 33,868,000    | 33,868,000    | 32,843,000     | 33,868,000     | 33,868,000    | 33,868,000    | 33,868,000     | 40,980,280     | 45,078,308    | DAU           |     |
| 8    | 01 | 01 | 2.03 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                       | 10,560,000    | 10,560,000    | 13,440,000     | 13,440,000                | 18,150,000    | 6,050,000     | 14,750,000     | 14,750,000     | 18,050,000    | 18,050,000    | 18,050,000     | 19,420,500     | 21,362,550    | DAU           |     |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                           | -             | 69,666,799    | 69,666,623     | 69,666,623                | 70,000,000    | 90,000,000    | 80,000,000     | 110,000,000    | 90,000,000    | 120,000,000   | 120,000,000    | 120,000,000    | 108,900,000   | 119,790,000   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                               | -             | -             | -              | -                         | 8,400,000     | 4,200,000     | -              | -              | 50,000,000    | 0             | -              | -              | 60,500,000    | 66,550,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | -             | -              | -                         | 8,400,000     | 4,200,000     | -              | -              | 50,000,000    | -             | -              | -              | 60,500,000    | 66,550,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                           | 35,000,000    | 180,486,451   | 186,300,000    | 186,300,000               | 235,200,000   | 214,700,000   | 189,000,000    | 189,000,000    | 214,700,000   | 221,195,667   | 221,195,667    | 221,195,667    | 259,787,000   | 285,765,700   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                        | 35,000,000    | 42,186,451    | 48,000,000     | 48,000,000                | 80,500,000    | 60,000,000    | 56,400,000     | 56,400,000     | 60,000,000    | 63,011,667    | 63,011,667     | 63,011,667     | 72,600,000    | 79,860,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                          | -             | 138,300,000   | 138,300,000    | 138,300,000               | 154,700,000   | 154,700,000   | 132,600,000    | 132,600,000    | 154,700,000   | 158,184,000   | 158,184,000    | 158,184,000    | 187,187,000   | 205,905,700   | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          | -             | 110,100,000   | 92,100,000     | 92,100,000                | 46,990,000    | 41,710,000    | 41,710,000     | 41,710,000     | 60,000,000    | 24,500,000    | 24,500,000     | 24,500,000     | 72,600,000    | 79,860,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | 21,600,000    | 3,600,000      | 3,600,000                 | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -              | -              | -             | -             | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                   | -             | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000                | 24,490,000    | 26,210,000    | 26,210,000     | 26,210,000     | 30,000,000    | 13,000,000    | 13,000,000     | 13,000,000     | 36,300,000    | 39,930,000    | DAU |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                   | -             | 58,500,000    | 58,500,000     | 58,500,000                | 22,500,000    | 15,500,000    | 15,500,000     | 15,500,000     | 30,000,000    | 11,500,000    | 11,500,000     | 11,500,000     | 36,300,000    | 39,930,000    | DAU |
| 8    | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                   | 100,000,000   | 103,000,000   | 4,000,000      | 4,000,000                 | 178,000,000   | 122,150,000   | 122,150,000    | 122,150,000    | 50,000,000    | 1,104,395,000 | 671,905,000    | 1,161,900,000  | 60,500,000    | 66,550,000    | DAU |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                        | 100,000,000   | 103,000,000   | 4,000,000      | 4,000,000                 | 178,000,000   | 122,150,000   | 122,150,000    | 122,150,000    | 50,000,000    | 1,104,395,000 | 671,905,000    | 1,161,900,000  | 60,500,000    | 66,550,000    | DAU |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                    | 100,000,000   | 103,000,000   | 4,000,000      | 4,000,000                 | -             | -             | -              | -              | 50,000,000    | 1,104,395,000 | 661,900,000    | 1,161,900,000  | 3,450,000,000 | 5,450,000,000 | DAU |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                             | -             | -             | -              | -                         | 178,000,000   | 122,150,000   | 122,150,000    | 122,150,000    | -             | -             | -              | -              | -             | -             | DAU |
| 8    | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                           | 1,199,176,000 | 2,198,423,500 | 2,018,656,500  | 2,018,656,50 <sub>0</sub> | 2,206,830,000 | 2,060,163,000 | 2,060,163,000  | 2,260,163,000  | 2,210,163,000 | 2,536,813,000 | 46,815,783,000 | 36,182,798,000 | 3,710,163,000 | 4,710,163,000 | DAU |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1,199,176,000 | 2,198,423,500 | 2,018,656,500  | 2,018,656,50 <sub>0</sub> | 2,206,830,000 | 2,060,163,000 | 2,060,163,000  | 2,260,163,000  | 2,210,163,000 | 2,536,813,000 | 46,815,783,000 | 36,182,798,000 | 3,710,163,000 | 4,710,163,000 | DAU |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                    | 1,199,176,000 | 2,198,423,500 | 2,018,656,500  | 2,018,656,50 <sub>0</sub> | 2,206,830,000 | 2,060,163,000 | 2,060,163,000  | 2,260,163,000  | 2,210,163,000 | 2,536,813,000 | 46,815,783,000 | 36,182,798,000 | 3,710,163,000 | 4,710,163,000 | DAU |
| 8    | 01 | 04 |      |    | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI                                                                                                                                                                                                                                 | 150,000,000   | 152,690,000   | 12,170,000     | 12,170,000                | 152,690,000   | 291,020,000   | 291,020,000    | 383,965,000    | 291,020,000   | 169,000,000   | 169,000,000    | 169,000,000    | 591,020,000   | 891,020,000   | DAU |

|                  |    |    |      |    | KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |               |             |     |
|------------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 8                | 01 | 04 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                   | 150,000,000   | 152,690,000   | 12,170,000    | 12,170,000    | 152,690,000   | 291,020,000   | 291,020,000   | 383,965,000   | 291,020,000   | 169,000,000   | 169,000,000    | 169,000,000    | 591,020,000   | 891,020,000   | DAU         |     |
| 8                | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                | 130,000,000   | 131,120,000   | 4,500,000     | 4,500,000     | 152,690,000   | 291,020,000   | 291,020,000   | 383,965,000   | 291,020,000   | 169,000,000   | 169,000,000    | 169,000,000    | 591,020,000   | 891,020,000   | DAU         |     |
| 8                | 01 | 04 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                        | 20,000,000    | 21,570,000    | 7,670,000     | 7,670,000     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | DAU         |     |
| 8                | 01 | 05 |      |    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                             | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 125,000,000    | 125,000,000   | 500,000,000   | 900,000,000 | DAU |
| 8                | 01 | 05 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                    | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 125,000,000    | 125,000,000   | 500,000,000   | 900,000,000 | DAU |
| 8                | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                   | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | 125,000,000    | 125,000,000   | 500,000,000   | 900,000,000 | DAU |
| 8                | 01 | 06 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                           | 105,000,000   | 106,500,000   | 108,925,000   | 108,925,000   | 106,500,000   | 109,200,000   | 109,200,000   | 166,255,000   | 625,000,000   | 319,850,000   | 319,850,000    | 319,850,000    | 1,025,000,000 | 1,375,000,000 | DAU         |     |
| 8                | 01 | 06 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                             | 105,000,000   | 106,500,000   | 108,925,000   | 108,925,000   | 106,500,000   | 109,200,000   | 109,200,000   | 166,255,000   | 625,000,000   | 319,850,000   | 319,850,000    | 319,850,000    | 1,025,000,000 | 1,375,000,000 | DAU         |     |
| 8                | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Da   | 35,000,000    | 35,000,000    | 36,525,000    | 36,525,000    | 106,500,000   | 109,200,000   | 109,200,000   | 166,255,000   | 600,000,000   | 294,850,000   | 294,850,000    | 294,850,000    | 900,000,000   | 1,100,000,000 | DAU         |     |
| 8                | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Dae | 70,000,000    | 71,500,000    | 72,400,000    | 72,400,000    | -             | -             | -             | -             | 25,000,000    | 25,000,000    |                | 25,000,000     | 125,000,000   | 275,000,000   | DAU         |     |
| TOTAL + GAJI     |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,888,554,000 | 6,355,222,359 | 5,734,305,143 | 5,641,617,133 | 6,444,838,159 | 6,020,632,300 | 6,491,899,389 | 6,841,899,389 | 6,708,385,727 | 8,325,389,744 | 51,746,138,167 | 52,246,138,167 | 8,117,146,730 | 8,928,861,403 |             |     |
| TOTAL TANPA GAJI |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,349,176,000 | 3,349,176,000 | 2,971,651,243 | 2,971,651,243 | 3,365,989,000 | 3,301,740,000 | 3,301,740,000 | 3,651,740,000 | 3,977,980,000 | 4,821,427,167 | 51,746,138,167 | 52,246,138,167 | 4,813,355,800 | 5,294,691,380 |             |     |

Majalengka, 18 Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. F. RAHYUBI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660822 198903 1 003